



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun

- 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

5. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ADD yang diberikan kepada setiap desa dengan jumlah yang sama untuk setiap Desa.
14. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa menggunakan rumus perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.

BAB II
PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu
Pengelolaan ADD

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) ADD digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

Bagian Kedua
Sumber Dana ADD

Pasal 3

ADD bersumber dari APBD dengan perhitungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB III
PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN ADD

Pasal 4

- (1) Pagu ADD sebesar Rp119.905.986.200,00 (seratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (2) Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk AD dan AF.
- (3) AD ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah ADD keseluruhan.
- (4) AF ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah ADD keseluruhan.

Pasal 5

- (1) Pagu ADD untuk setiap Desa merupakan penjumlahan AD dan AF masing-masing Desa dengan rumus penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rumusan pagu ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, yang hanya mendapatkan AD.

Pasal 6

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dibagi secara merata kepada 340 (tiga ratus empat puluh) Desa di wilayah Daerah.
- (2) Besaran AD untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dibagi secara proporsional kepada 340 (tiga ratus empat puluh) Desa di wilayah Daerah.
- (2) AF untuk masing-masing Desa dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis, dengan prosentase bobot nilai sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk 10 % (sepuluh persen);
 - b. jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga 70 % (tujuh puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa 10 % (sepuluh persen); dan
 - d. indeks kesulitan geografis 10 % (sepuluh persen).
- (3) Rasio jumlah penduduk (JP), jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga (JRTRW), luas wilayah Desa (LWD), indeks

kesulitan geografis (IKG), dari masing-masing bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Rasio JP = Jumlah Penduduk Desa

Jumlah Penduduk Desa se Daerah;

b. Rasio JPM = Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga se Daerah;

c. Rasio LWD = Jumlah Luas Wilayah Desa

Jumlah Luas Wilayah Desa se Daerah; dan

d. Rasio IKG = Rasio IKG Desa

Rasio IKG Daerah.

(4) Besaran AF untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran ADD untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN ADD

Pasal 9

(1) Penggunaan ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

(2) ADD yang diterima oleh Desa dapat digunakan untuk membiayai belanja Desa pada kegiatan-kegiatan yang

berpedoman pada RPJMDes, RKPDes, dan/atau Musyawarah Desa.

BAB V PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalisasikan sesuai penerimaan sumber dana pada APBD Tahun 2024.
- (3) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dana untuk ADD tersedia di RKUD dan setelah persyaratan dipenuhi oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Penyaluran Pagu ADD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- d. Tahap IV paling cepat bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. LRA ADD Tahap IV Tahun 2023, dengan realisasi penggunaan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
- (2) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. LRA ADD Tahap I dengan realisasi penggunaan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
- (3) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan LRA ADD Tahap II dengan realisasi penggunaan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
- (4) Penyaluran ADD Tahap IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. LRA ADD Tahap III dengan realisasi penggunaan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 13

- (1) Persyaratan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Mekanisme penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan ADD berpedoman kepada peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan desa.

- (2) Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan ADD menjadi tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 15

- (1) Perencanaan ADD dilaksanakan paling lambat bulan Desember tahun 2023.
- (2) Kepala Desa wajib menginformasikan kegiatan dalam APBDesa pada:
- a. media papan pengumuman yang ada di depan kantor pemerintah Desa dan/atau di tempat strategis yang mudah diakses oleh masyarakat;
 - b. *website* Desa;
 - c. media sosial yang akunnya dimiliki pemerintah Desa; dan
 - d. media lainnya yang dapat menjadi alat untuk menginformasikan kepada masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan ADD untuk kegiatan fisik dan non fisik wajib didokumentasikan dalam bentuk foto.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik Desa wajib dicantumkan dalam papan kegiatan yang paling sedikit memuat nama kegiatan, volume, jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan, yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Hasil pembangunan fisik Desa wajib dibuatkan prasasti yang paling sedikit memuat nama kegiatan, volume, jumlah dana, sumber dana dan tanggal penyelesaian, yang dibuat oleh pelaksana kegiatan/tim pelaksana kegiatan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. memberikan pelatihan penyelenggaraan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- c. fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi ADD; dan
- d. pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19810228 200604 2 009

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 101 TAHUN 2023
TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

RUMUS PENGHITUNGAN PAGU ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

ADD setiap Desa= (AD masing-masing Desa + AF masing-masing Desa)

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

IWAN KURNIAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 101 TAHUN 2023
 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2024

RINCIAN ALOKASI DASAR, ALOKASI FORMULA, DAN PAGU ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1	MALINGPING	CILANGKAHAN	282.131.732	57.300.000	339.431.732
2	MALINGPING	PAGELARAN	282.131.732	74.381.000	356.512.732
3	MALINGPING	SUKARAJA	282.131.732	79.057.000	361.188.732
4	MALINGPING	MALINGPING UTARA	282.131.732	55.998.000	338.129.732
5	MALINGPING	BOLANG	282.131.732	67.847.000	349.978.732
6	MALINGPING	CIPEUNDEUY	282.131.732	64.225.000	346.356.732
7	MALINGPING	RAHONG	282.131.732	55.962.000	338.093.732
8	MALINGPING	KADUJAJAR	282.131.732	85.580.000	367.711.732

9	MALINGPING	KERSARATU	282.131.732	112.158.000	394.289.732
10	MALINGPING	MALINGPING SELATAN	282.131.732	47.898.000	330.029.732
11	MALINGPING	SUMBERWARAS	282.131.732	86.172.000	368.303.732
12	MALINGPING	SUKAMANAH	282.131.732	65.249.000	347.380.732
13	MALINGPING	SENGHATI	282.131.732	53.995.000	336.126.732
14	MALINGPING	SANGIANG	282.131.732	44.037.000	326.168.732
15	PANGGARANGAN	PANGGARANGAN	282.131.732	77.574.000	359.705.732
16	PANGGARANGAN	JATAKE	282.131.732	74.744.000	356.875.732
17	PANGGARANGAN	SOGONG	282.131.732	77.953.000	360.084.732
18	PANGGARANGAN	CIMANDIRI	282.131.732	105.353.000	387.484.732
19	PANGGARANGAN	GUNUNGGEDE	282.131.732	89.960.000	372.091.732
20	PANGGARANGAN	SITUREGEN	282.131.732	113.275.000	395.406.732
21	PANGGARANGAN	MEKARJAYA	282.131.732	103.045.000	385.176.732
22	PANGGARANGAN	SINDANGRATU	282.131.732	85.699.000	367.830.732
23	PANGGARANGAN	HEGARMANAH	282.131.732	45.405.000	327.536.732
24	PANGGARANGAN	SUKAJADI	282.131.732	79.095.000	361.226.732
25	PANGGARANGAN	CIBARENGKOK	282.131.732	76.810.000	358.941.732
26	BAYAH	BAYAH BARAT	282.131.732	120.095.000	402.226.732
27	BAYAH	SAWARNA	282.131.732	111.745.000	393.876.732
28	BAYAH	CIDIKIT	282.131.732	111.780.000	393.911.732

29	BAYAH	SUWAKAN	282.131.732	117.371.000	399.502.732
30	BAYAH	CIMANCAK	282.131.732	87.046.000	369.177.732
31	BAYAH	DARMASARI	282.131.732	67.454.000	349.585.732
32	BAYAH	BAYAH TIMUR	282.131.732	119.696.000	401.827.732
33	BAYAH	CISUREN	282.131.732	79.192.000	361.323.732
34	BAYAH	PASIRGOMBONG	282.131.732	61.943.000	344.074.732
35	BAYAH	SAWARNA TIMUR	282.131.732	59.479.000	341.610.732
36	BAYAH	PAMUBULAN	282.131.732	113.072.000	395.203.732
37	CIPANAS	CIPANAS	282.131.732	76.395.000	358.526.732
38	CIPANAS	GIRILAYA	282.131.732	75.595.000	357.726.732
39	CIPANAS	MALANGSARI	282.131.732	51.177.000	333.308.732
40	CIPANAS	BINTANGRESMI	282.131.732	56.866.000	338.997.732
41	CIPANAS	TALAGAHYANG	282.131.732	48.083.000	330.214.732
42	CIPANAS	LUHURJAYA	282.131.732	103.650.000	385.781.732
43	CIPANAS	HAURGAJRUG	282.131.732	90.574.000	372.705.732
44	CIPANAS	GIRIHARJA	282.131.732	63.557.000	345.688.732
45	CIPANAS	SUKASARI	282.131.732	95.275.000	377.406.732
46	CIPANAS	JAYAPURA	282.131.732	53.928.000	336.059.732
47	CIPANAS	SIPAYUNG	282.131.732	74.781.000	356.912.732
48	CIPANAS	BINTANGSARI	282.131.732	45.660.000	327.791.732

49	CIPANAS	PASIRHAUR	282.131.732	63.642.000	345.773.732
50	CIPANAS	HARUMSARI	282.131.732	60.299.000	342.430.732
51	MUNCANG	PASIREURIH	282.131.732	65.074.000	347.205.732
52	MUNCANG	CIMINYAK	282.131.732	63.865.000	345.996.732
53	MUNCANG	MUNCANG	282.131.732	61.379.000	343.510.732
54	MUNCANG	LEUWICOO	282.131.732	58.793.000	340.924.732
55	MUNCANG	SINDANGWANGI	282.131.732	53.114.000	335.245.732
56	MUNCANG	CIKARANG	282.131.732	59.173.000	341.304.732
57	MUNCANG	SUKANAGARA	282.131.732	64.754.000	346.885.732
58	MUNCANG	PASIRNANGKA	282.131.732	51.953.000	334.084.732
59	MUNCANG	JAGARAKSA	282.131.732	54.333.000	336.464.732
60	MUNCANG	TANJUNGWANGI	282.131.732	50.934.000	333.065.732
61	MUNCANG	MEKARWANGI	282.131.732	54.699.000	336.830.732
62	MUNCANG	GIRIJAGABAYA	282.131.732	62.160.000	344.291.732
63	LEUWIDAMAR	KANEKES	282.131.732	224.494.000	506.625.732
64	LEUWIDAMAR	CISIMEUT	282.131.732	112.810.000	394.941.732
65	LEUWIDAMAR	CIBUNGUR	282.131.732	84.270.000	366.401.732
66	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR	282.131.732	91.568.000	373.699.732
67	LEUWIDAMAR	LEBAKPARAHANG	282.131.732	60.601.000	342.732.732
68	LEUWIDAMAR	SANGKANWANGI	282.131.732	92.108.000	374.239.732

69	LEUWIDAMAR	NAYAGATI	282.131.732	93.378.000	375.509.732
70	LEUWIDAMAR	BOJONGMENTENG	282.131.732	67.032.000	349.163.732
71	LEUWIDAMAR	MARGAWANGI	282.131.732	56.041.000	338.172.732
72	LEUWIDAMAR	WANTISARI	282.131.732	66.710.000	348.841.732
73	LEUWIDAMAR	JALUPANGMULYA	282.131.732	84.830.000	366.961.732
74	LEUWIDAMAR	CISIMEUT RAYA	282.131.732	81.695.000	363.826.732
75	BOJONGMANIK	BOJONGMANIK	282.131.732	71.046.000	353.177.732
76	BOJONGMANIK	HARJAWANA	282.131.732	68.486.000	350.617.732
77	BOJONGMANIK	KADURAHAYU	282.131.732	44.067.000	326.198.732
78	BOJONGMANIK	CIMAYANG	282.131.732	70.161.000	352.292.732
79	BOJONGMANIK	PARAKANBEUSI	282.131.732	80.330.000	362.461.732
80	BOJONGMANIK	KEBONCAU	282.131.732	77.294.000	359.425.732
81	BOJONGMANIK	MEKARMANIK	282.131.732	82.517.000	364.648.732
82	BOJONGMANIK	MEKAR RAHAYU	282.131.732	40.087.000	322.218.732
83	BOJONGMANIK	PASIRBITUNG	282.131.732	49.227.000	331.358.732
84	GUNUNGKENCANA	GUNUNGKENCANA	282.131.732	53.894.000	336.025.732
85	GUNUNGKENCANA	CIMANYANGRAY	282.131.732	70.711.000	352.842.732
86	GUNUNGKENCANA	GUNUNGKENDENG	282.131.732	46.967.000	329.098.732
87	GUNUNGKENCANA	CISAMPANG	282.131.732	48.847.000	330.978.732
88	GUNUNGKENCANA	CIGINGGANG	282.131.732	85.632.000	367.763.732

89	GUNUNGKENCANA	CIAKAR	282.131.732	78.207.000	360.338.732
90	GUNUNGKENCANA	CICARINGIN	282.131.732	72.491.000	354.622.732
91	GUNUNGKENCANA	BULAKAN	282.131.732	60.959.000	343.090.732
92	GUNUNGKENCANA	SUKANEGARA	282.131.732	54.553.000	336.684.732
93	GUNUNGKENCANA	BOJONGKONENG	282.131.732	48.329.000	330.460.732
94	GUNUNGKENCANA	KRAMATJAYA	282.131.732	97.444.000	379.575.732
95	GUNUNGKENCANA	TANJUNGSARI INDAH	282.131.732	42.474.000	324.605.732
96	BANJARSARI	KERTA	282.131.732	57.385.000	339.516.732
97	BANJARSARI	BOJONGJURUH	282.131.732	65.299.000	347.430.732
98	BANJARSARI	LEUWIIPUH	282.131.732	63.926.000	346.057.732
99	BANJARSARI	LEBAKKEUSIK	282.131.732	60.198.000	342.329.732
100	BANJARSARI	CILEGONGILIR	282.131.732	60.919.000	343.050.732
101	BANJARSARI	KEUSIK	282.131.732	55.160.000	337.291.732
102	BANJARSARI	CIBATURKEUSIK	282.131.732	42.226.000	324.357.732
103	BANJARSARI	KUMPAY	282.131.732	71.829.000	353.960.732
104	BANJARSARI	JALUPANGGIRANG	282.131.732	50.687.000	332.818.732
105	BANJARSARI	BENDUNGAN	282.131.732	71.359.000	353.490.732
106	BANJARSARI	KERTARAHARJA	282.131.732	114.881.000	397.012.732
107	BANJARSARI	CISAMPIH	282.131.732	62.907.000	345.038.732
108	BANJARSARI	GUNUNGSARI	282.131.732	56.893.000	339.024.732

109	BANJARSARI	TAMANSARI	282.131.732	49.044.000	331.175.732
110	BANJARSARI	CIDAHU	282.131.732	52.733.000	334.864.732
111	BANJARSARI	CIRUJI	282.131.732	62.559.000	344.690.732
112	BANJARSARI	KADUHAUK	282.131.732	55.414.000	337.545.732
113	BANJARSARI	LABANJAYA	282.131.732	50.586.000	332.717.732
114	BANJARSARI	UMBULJAYA	282.131.732	63.081.000	345.212.732
115	BANJARSARI	KERTARAHAYU	282.131.732	54.958.000	337.089.732
116	CILELES	PASINDANGAN	282.131.732	92.945.000	375.076.732
117	CILELES	PARUNGKUJANG	282.131.732	78.001.000	360.132.732
118	CILELES	CILELES	282.131.732	59.963.000	342.094.732
119	CILELES	CIKAREO	282.131.732	72.212.000	354.343.732
120	CILELES	CIPADANG	282.131.732	96.169.000	378.300.732
121	CILELES	GUMURUH	282.131.732	68.508.000	350.639.732
122	CILELES	PRABUGANTUNGAN	282.131.732	77.559.000	359.690.732
123	CILELES	DAROYON	282.131.732	67.620.000	349.751.732
124	CILELES	MARGAMULYA	282.131.732	71.131.000	353.262.732
125	CILELES	MEKARJAYA	282.131.732	67.681.000	349.812.732
126	CILELES	KUJANGSARI	282.131.732	75.631.000	357.762.732
127	CILELES	BANJARSARI	282.131.732	93.758.000	375.889.732
128	CIMARGA	SARAGENI	282.131.732	44.950.000	327.081.732

129	CIMARGA	GUNUNGANTEN	282.131.732	65.159.000	347.290.732
130	CIMARGA	SUDAMANIK	282.131.732	94.020.000	376.151.732
131	CIMARGA	TAMBAK	282.131.732	76.695.000	358.826.732
132	CIMARGA	CIMARGA	282.131.732	87.009.000	369.140.732
133	CIMARGA	KARYAJAYA	282.131.732	78.402.000	360.533.732
134	CIMARGA	MARGAJAYA	282.131.732	114.765.000	396.896.732
135	CIMARGA	JAYAMANIK	282.131.732	82.805.000	364.936.732
136	CIMARGA	MARGALUYU	282.131.732	62.389.000	344.520.732
137	CIMARGA	MARGATIRTA	282.131.732	71.546.000	353.677.732
138	CIMARGA	INTENJAYA	282.131.732	66.187.000	348.318.732
139	CIMARGA	MEKARJAYA	282.131.732	59.168.000	341.299.732
140	CIMARGA	JAYASARI	282.131.732	50.308.000	332.439.732
141	CIMARGA	GIRIMUKTI	282.131.732	78.165.000	360.296.732
142	CIMARGA	SANGKANMANIK	282.131.732	66.695.000	348.826.732
143	CIMARGA	SANGIANGJAYA	282.131.732	74.897.000	357.028.732
144	CIMARGA	MEKARMULYA	282.131.732	75.952.000	358.083.732
145	SAJIRA	MARAYA	282.131.732	75.837.000	357.968.732
146	SAJIRA	SAJIRA	282.131.732	52.502.000	334.633.732
147	SAJIRA	SUKARAME	282.131.732	83.855.000	365.986.732
148	SAJIRA	CALUNGBUNGUR	282.131.732	67.121.000	349.252.732

149	SAJIRA	PARUNGSARI	282.131.732	71.903.000	354.034.732
150	SAJIRA	SINDANGSARI	282.131.732	73.685.000	355.816.732
151	SAJIRA	MEKARSARI	282.131.732	55.150.000	337.281.732
152	SAJIRA	SUKAMARGA	282.131.732	75.825.000	357.956.732
153	SAJIRA	PAJAGAN	282.131.732	84.228.000	366.359.732
154	SAJIRA	SUKAJAYA	282.131.732	58.012.000	340.143.732
155	SAJIRA	SAJIRA MEKAR	282.131.732	66.917.000	349.048.732
156	SAJIRA	PAJA	282.131.732	36.145.000	318.276.732
157	SAJIRA	MARGALUYU	282.131.732	89.813.000	371.944.732
158	SAJIRA	BUNGURMEKAR	282.131.732	55.158.000	337.289.732
159	SAJIRA	CIUYAH	282.131.732	76.773.000	358.904.732
160	MAJA	TANJUNGSARI	282.131.732	53.105.000	335.236.732
161	MAJA	MAJA	282.131.732	79.846.000	361.977.732
162	MAJA	SANGIANG	282.131.732	68.214.000	350.345.732
163	MAJA	BINONG	282.131.732	71.912.000	354.043.732
164	MAJA	GUBUGAN CIBEUREUM	282.131.732	41.594.000	323.725.732
165	MAJA	MEKARSARI	282.131.732	56.798.000	338.929.732
166	MAJA	PADASUKA	282.131.732	83.206.000	365.337.732
167	MAJA	CURUGBADAK	282.131.732	76.590.000	358.721.732

168	MAJA	SINDANGMULYA	282.131.732	68.829.000	350.960.732
169	MAJA	CILANGKAP	282.131.732	57.916.000	340.047.732
170	MAJA	PASIRKEMBANG	282.131.732	64.865.000	346.996.732
171	MAJA	PASIRKECAPI	282.131.732	50.081.000	332.212.732
172	MAJA	BUYUT MEKAR	282.131.732	51.329.000	333.460.732
173	MAJA	MAJA BARU	282.131.732	63.034.000	345.165.732
174	RANGKASBITUNG	PASIRTANJUNG	282.131.732	92.215.000	374.346.732
175	RANGKASBITUNG	CITERAS	282.131.732	125.279.000	407.410.732
176	RANGKASBITUNG	NAMENG	282.131.732	106.644.000	388.775.732
177	RANGKASBITUNG	KOLELET WETAN	282.131.732	63.806.000	345.937.732
178	RANGKASBITUNG	JATIMULYA	282.131.732	94.383.000	376.514.732
179	RANGKASBITUNG	MEKARSARI	282.131.732	79.367.000	361.498.732
180	RANGKASBITUNG	PABUARAN	282.131.732	63.745.000	345.876.732
181	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG TIMUR	282.131.732	155.825.000	437.956.732
182	RANGKASBITUNG	SUKAMANAH	282.131.732	70.022.000	352.153.732
183	RANGKASBITUNG	CIMANGEUNTEUNG	282.131.732	78.413.000	360.544.732
184	RANGKASBITUNG	NARIMBANG MULIA	282.131.732	101.741.000	383.872.732
185	WARUNGGUNUNG	SUKARENDAH	282.131.732	92.447.000	374.578.732
186	WARUNGGUNUNG	WARUNGGUNUNG	282.131.732	70.018.000	352.149.732

187	WARUNGGUNUNG	CIBUAH	282.131.732	87.389.000	369.520.732
188	WARUNGGUNUNG	PASIR TANGKIL	282.131.732	73.721.000	355.852.732
189	WARUNGGUNUNG	BAROS	282.131.732	47.794.000	329.925.732
190	WARUNGGUNUNG	BANJARSARI	282.131.732	94.244.000	376.375.732
191	WARUNGGUNUNG	PADASUKA	282.131.732	96.128.000	378.259.732
192	WARUNGGUNUNG	SUKARAJA	282.131.732	95.496.000	377.627.732
193	WARUNGGUNUNG	JAGABAYA	282.131.732	75.957.000	358.088.732
194	WARUNGGUNUNG	SELARAJA	282.131.732	66.081.000	348.212.732
195	WARUNGGUNUNG	CEMPAKA	282.131.732	52.540.000	334.671.732
196	WARUNGGUNUNG	SINDANGSARI	282.131.732	43.856.000	325.987.732
197	CIJAKU	MEKARJAYA	282.131.732	49.809.000	331.940.732
198	CIJAKU	CIPALABUH	282.131.732	71.293.000	353.424.732
199	CIJAKU	CIJAKU	282.131.732	49.506.000	331.637.732
200	CIJAKU	CIBEUREUM	282.131.732	48.482.000	330.613.732
201	CIJAKU	CIAPUS	282.131.732	65.570.000	347.701.732
202	CIJAKU	KANDANGSAPI	282.131.732	79.769.000	361.900.732
203	CIJAKU	CIHUJAN	282.131.732	48.848.000	330.979.732
204	CIJAKU	CIMENGA	282.131.732	50.312.000	332.443.732
205	CIJAKU	KAPUNDUHAN	282.131.732	47.236.000	329.367.732
206	CIJAKU	SUKASENANG	282.131.732	56.057.000	338.188.732

207	CIKULUR	ANGGALAN	282.131.732	59.426.000	341.557.732
208	CIKULUR	MUNCANGKOPONG	282.131.732	60.464.000	342.595.732
209	CIKULUR	SUKAHARJA	282.131.732	40.608.000	322.739.732
210	CIKULUR	TAMANJAYA	282.131.732	50.452.000	332.583.732
211	CIKULUR	CIGOONG UTARA	282.131.732	58.919.000	341.050.732
212	CIKULUR	MUARADUA	282.131.732	80.138.000	362.269.732
213	CIKULUR	CIKULUR	282.131.732	57.736.000	339.867.732
214	CIKULUR	CURUGPANJANG	282.131.732	74.764.000	356.895.732
215	CIKULUR	CIGOONG SELATAN	282.131.732	53.188.000	335.319.732
216	CIKULUR	SUMURBANDUNG	282.131.732	98.675.000	380.806.732
217	CIKULUR	PARAGE	282.131.732	44.446.000	326.577.732
218	CIKULUR	SUKADAYA	282.131.732	68.714.000	350.845.732
219	CIKULUR	PASIRGINTUNG	282.131.732	46.382.000	328.513.732
220	CIBADAK	TAMBAKBAYA	282.131.732	87.456.000	369.587.732
221	CIBADAK	KADUAGUNG TIMUR	282.131.732	86.009.000	368.140.732
222	CIBADAK	PANANCANGAN	282.131.732	47.936.000	330.067.732
223	CIBADAK	CIBADAK	282.131.732	68.224.000	350.355.732
224	CIBADAK	ASEM	282.131.732	50.047.000	332.178.732
225	CIBADAK	CISANGU	282.131.732	57.143.000	339.274.732
226	CIBADAK	KADUAGUNG BARAT	282.131.732	71.591.000	353.722.732

227	CIBADAK	BOJONGCAE	282.131.732	51.408.000	333.539.732
228	CIBADAK	MALABAR	282.131.732	56.255.000	338.386.732
229	CIBADAK	PASAR KEONG	282.131.732	68.343.000	350.474.732
230	CIBADAK	BOJONG LELES	282.131.732	114.292.000	396.423.732
231	CIBADAK	CIMENTENG JAYA	282.131.732	33.144.320	315.276.052
232	CIBADAK	MEKAR AGUNG	282.131.732	83.100.000	365.231.732
233	CIBADAK	ASEM MARGALUYU	282.131.732	60.627.000	342.758.732
234	CIBADAK	KADUAGUNG TENGAH	282.131.732	74.780.000	356.911.732
235	CIBEBER	CIBEBER	282.131.732	91.321.000	373.452.732
236	CIBEBER	CITOREK TENGAH	282.131.732	106.417.000	388.548.732
237	CIBEBER	CISUNGSANG	282.131.732	44.690.000	326.821.732
238	CIBEBER	KUJANGJAYA	282.131.732	57.517.000	339.648.732
239	CIBEBER	KUJANGSARI	282.131.732	52.881.000	335.012.732
240	CIBEBER	NEGLASARI	282.131.732	90.327.000	372.458.732
241	CIBEBER	MEKARSARI	282.131.732	75.126.000	357.257.732
242	CIBEBER	CIKOTOK	282.131.732	60.561.000	342.692.732
243	CIBEBER	SUKAMULYA	282.131.732	62.583.000	344.714.732
244	CIBEBER	CITOREK TIMUR	282.131.732	66.395.000	348.526.732
245	CIBEBER	WARUNGBANTEN	282.131.732	68.635.000	350.766.732
246	CIBEBER	HEGARMANAH	282.131.732	62.399.000	344.530.732

247	CIBEBER	SITUMULYA	282.131.732	61.063.000	343.194.732
248	CIBEBER	CITOREK KIDUL	282.131.732	79.936.000	362.067.732
249	CIBEBER	CIKADU	282.131.732	71.556.000	353.687.732
250	CIBEBER	SIRNAGALIH	282.131.732	69.056.000	351.187.732
251	CIBEBER	CIHAMBALI	282.131.732	54.397.000	336.528.732
252	CIBEBER	CITOREK BARAT	282.131.732	64.032.000	346.163.732
253	CIBEBER	GUNUNGWANGUN	282.131.732	47.302.000	329.433.732
254	CIBEBER	WANASARI	282.131.732	62.448.000	344.579.732
255	CIBEBER	CITOREK SABRANG	282.131.732	62.047.000	344.178.732
256	CIBEBER	CIHERANG	282.131.732	62.026.000	344.157.732
257	CILOGRANG	CILOGRANG	282.131.732	87.738.000	369.869.732
258	CILOGRANG	CIBARENO	282.131.732	58.355.000	340.486.732
259	CILOGRANG	CIKAMUNDING	282.131.732	84.444.000	366.575.732
260	CILOGRANG	CIJENGKOL	282.131.732	115.585.000	397.716.732
261	CILOGRANG	PASIRBUNGUR	282.131.732	135.393.000	417.524.732
262	CILOGRANG	LEBAKTIPAR	282.131.732	77.822.000	359.953.732
263	CILOGRANG	CIKATOMAS	282.131.732	93.622.000	375.753.732
264	CILOGRANG	GIRIMUKTI	282.131.732	74.634.000	356.765.732
265	CILOGRANG	CIREUNDEU	282.131.732	63.892.000	346.023.732
266	CILOGRANG	GUNUNGBATU	282.131.732	73.082.000	355.213.732

267	WANASALAM	WANASALAM	282.131.732	87.536.000	369.667.732
268	WANASALAM	BEJOD	282.131.732	84.304.000	366.435.732
269	WANASALAM	CILANGKAP	282.131.732	40.557.000	322.688.732
270	WANASALAM	CIPEUCANG	282.131.732	53.858.000	335.989.732
271	WANASALAM	MUARA	282.131.732	108.430.000	390.561.732
272	WANASALAM	PARUNGPANJANG	282.131.732	66.606.000	348.737.732
273	WANASALAM	CIKEUSIK	282.131.732	53.605.000	335.736.732
274	WANASALAM	KATAPANG	282.131.732	54.411.000	336.542.732
275	WANASALAM	CISARAP	282.131.732	68.156.000	350.287.732
276	WANASALAM	SUKATANI	282.131.732	75.148.000	357.279.732
277	WANASALAM	CIPEDANG	282.131.732	62.600.000	344.731.732
278	WANASALAM	PARUNGSARI	282.131.732	45.161.000	327.292.732
279	WANASALAM	KARANGPAMINDANGAN	282.131.732	49.551.000	331.682.732
280	SOBANG	CIPARASI	282.131.732	75.607.000	357.738.732
281	SOBANG	SOBANG	282.131.732	100.754.000	382.885.732
282	SOBANG	SUKAJAYA	282.131.732	64.072.000	346.203.732
283	SOBANG	SINDANGLAYA	282.131.732	82.027.000	364.158.732
284	SOBANG	SUKAMAJU	282.131.732	104.473.000	386.604.732
285	SOBANG	HARIANG	282.131.732	97.834.000	379.965.732
286	SOBANG	MAJASARI	282.131.732	78.369.000	360.500.732

287	SOBANG	SINAR JAYA	282.131.732	61.020.000	343.151.732
288	SOBANG	CIROMPANG	282.131.732	59.076.000	341.207.732
289	SOBANG	SUKARESMI	282.131.732	62.990.000	345.121.732
290	CURUG BITUNG	GURADOG	282.131.732	59.935.000	342.066.732
291	CURUG BITUNG	CURUGBITUNG	282.131.732	46.281.000	328.412.732
292	CURUG BITUNG	CANDI	282.131.732	50.477.000	332.608.732
293	CURUG BITUNG	MAYAK	282.131.732	44.797.000	326.928.732
294	CURUG BITUNG	CIPINING	282.131.732	59.891.000	342.022.732
295	CURUG BITUNG	CILAYANG	282.131.732	54.304.000	336.435.732
296	CURUG BITUNG	CIBURUY	282.131.732	81.086.000	363.217.732
297	CURUG BITUNG	SEKARWANGI	282.131.732	60.263.000	342.394.732
298	CURUG BITUNG	CIDADAP	282.131.732	60.408.000	342.539.732
299	CURUG BITUNG	LEBAKASIH	282.131.732	46.883.000	329.014.732
300	KALANGANYAR	KALANGANYAR	282.131.732	67.270.000	349.401.732
301	KALANGANYAR	PASIRKUPA	282.131.732	84.255.000	366.386.732
302	KALANGANYAR	CILANGKAP	282.131.732	72.568.000	354.699.732
303	KALANGANYAR	AWEH	282.131.732	70.611.000	352.742.732
304	KALANGANYAR	SANGIANGTANJUNG	282.131.732	78.367.000	360.498.732
305	KALANGANYAR	SUKAMEKARSARI	282.131.732	84.549.000	366.680.732
306	KALANGANYAR	CIKATAPIS	282.131.732	54.430.000	336.561.732

307	LEBAKGEDONG	BANJARIRIGASI	282.131.732	54.715.000	336.846.732
308	LEBAKGEDONG	CILADAEUN	282.131.732	62.559.000	344.690.732
309	LEBAKGEDONG	LEBAKGEDONG	282.131.732	66.764.000	348.895.732
310	LEBAKGEDONG	BANJARSARI	282.131.732	43.329.000	325.460.732
311	LEBAKGEDONG	LEBAKSITU	282.131.732	66.208.000	348.339.732
312	LEBAKGEDONG	LEBAKSANGKA	282.131.732	56.497.000	338.628.732
313	CIHARA	PANYAUNGAN	282.131.732	95.966.000	378.097.732
314	CIHARA	CIHARA	282.131.732	52.957.000	335.088.732
315	CIHARA	CIPARAHU	282.131.732	83.969.000	366.100.732
316	CIHARA	PONDOKPANJANG	282.131.732	87.308.000	369.439.732
317	CIHARA	CITEUPUSEUN	282.131.732	52.555.000	334.686.732
318	CIHARA	LEBAKPEUNDEUY	282.131.732	60.986.000	343.117.732
319	CIHARA	MEKARSARI	282.131.732	90.850.000	372.981.732
320	CIHARA	KARANGKAMULYAN	282.131.732	72.088.000	354.219.732
321	CIHARA	BARUNAI	282.131.732	52.237.000	334.368.732
322	CIRINTEN	DATARCAE	282.131.732	59.312.000	341.443.732
323	CIRINTEN	CIRINTEN	282.131.732	115.167.000	397.298.732
324	CIRINTEN	KARANGNUNGGAL	282.131.732	50.484.000	332.615.732
325	CIRINTEN	KADUDAMAS	282.131.732	92.996.000	375.127.732
326	CIRINTEN	BADUR	282.131.732	70.872.000	353.003.732

327	CIRINTEN	PARAKANLIMA	282.131.732	107.055.000	389.186.732
328	CIRINTEN	NANGGERANG	282.131.732	83.292.000	365.423.732
329	CIRINTEN	CEMPAKA	282.131.732	58.586.000	340.717.732
330	CIRINTEN	KAROYA	282.131.732	59.322.000	341.453.732
331	CIRINTEN	CIBARANI	282.131.732	64.140.000	346.271.732
332	CIGEMBLONG	PEUCANGPARI	282.131.732	68.480.000	350.611.732
333	CIGEMBLONG	CIBUNGUR	282.131.732	46.429.000	328.560.732
334	CIGEMBLONG	MUGJAYA	282.131.732	47.423.000	329.554.732
335	CIGEMBLONG	CIKATE	282.131.732	57.470.000	339.601.732
336	CIGEMBLONG	CIGEMBLONG	282.131.732	62.575.000	344.706.732
337	CIGEMBLONG	CIKADONGDONG	282.131.732	58.572.000	340.703.732
338	CIGEMBLONG	CIKARET	282.131.732	60.445.000	342.576.732
339	CIGEMBLONG	WANGUNJAYA	282.131.732	59.124.000	341.255.732
340	CIGEMBLONG	CIKARATUAN	282.131.732	63.208.000	345.339.732
JUMLAH			95.924.788.880	23.981.197.320	119.905.986.200

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

IWAN KURNIAWAN